

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan pilar bagi suatu negara. Pendidikan juga menjadi dasar kebutuhan mutlak sebagai penopang keberlangsungan dan keutuhan suatu negara (Spychalski, 2023). Kedudukan pendidikan yang begitu krusial ini menjadikan mutu pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara (Kaklauskas & Kaklauskiene, 2022). Pendidikan dipandang sebagai suatu upaya sadar yang dilakukan oleh individu untuk membantu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan upaya-upaya yang baik, teratur, dan dengan tujuan yang konkrit (Biancardi et al., 2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada Bab II Pasal 3, menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional beserta tujuannya. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, nilai-nilai, dan peradaban bangsa, dengan harapan dapat membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat secara fisik dan mental, memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, kemandirian, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, maka perlu dilakukan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan secara profesional. Salah satu pendekatan yang mengakomodasi tuntutan manajemen pendidikan di tingkat sekolah adalah manajemen berbasis sekolah, dimana Kepala sekolah memegang peranan kunci dalam menentukan kebijakan dan visi pendidikan di sekolah, yang berpengaruh langsung pada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas sekolah dapat bervariasi, tergantung pada bagaimana sekolah tersebut mengadaptasi dan menerapkan 8 standar nasional pendidikan (Haluti, 2019). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021, standar pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Standar Pendidikan Nasional (SNP) yang menjadi acuan utama dalam proses pendidikan yang merupakan kriteria minimum untuk seluruh sistem pendidikan berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar inilah yang menjadi tolak ukur pelaksanaan sistem pendidikan

di Indonesia agar mutu pendidikan terjamin. Tidak menutup kemungkinan sekolah mampu menerapkan lebih dari 8 standar tersebut. Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) telah menetapkan delapan standar utama, yaitu: standar untuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pembiayaan, serta kompetensi lulusan.

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menggarisbawahi tiga aspek utama dalam penilaian mutu pendidikan. Pertama, kompetensi, yang menuntut agar lulusan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kompetensi nasional. Kedua, akreditasi, yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya pendidikan di sekolah yang mendukung tercapainya lulusan yang berkualitas. Ketiga, akuntabilitas yaitu kewajiban pihak penyelenggara pendidikan (seperti kepala sekolah, guru, dan staf administrasi) untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan, tindakan, dan hasil pendidikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Mutu jika dikaitkan dengan pendidikan maka mutu dalam pendidikan dipandang sebagai ketercapaian jaminan nilai atau kualitas dalam satuan pendidikan, sehingga suatu satuan pendidikan dikatakan bermutu jika satuan pendidikan tersebut menyusun jaminan kualitas dan diakhir periode susunan jaminan kualitas yang ditetapkan tercapai (Firdaus, et al, 2021).

Oleh karena itu, jelas bahwa mutu menjadi patokan yang menjamin perkembangan bagi satuan pendidikan. Dengan terstandarnya kualitas yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan maka tujuan dan langkah yang diambil semakin terarah. Selain itu, kualitas sebuah sekolah dapat dilihat dari sejauh mana administrasinya terorganisir dengan rapi, termasuk dalam penerapan sistem kerja yang berjalan efisien dan efektif, baik di tingkat vertikal maupun horizontal. Namun tidak dipungkiri hambatan dalam mencapai standar mutu tersebut tentu ditemukan dalam praktik pelaksanaannya sehingga menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia rendah (Oktaviani, 2019).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2021 Dinas Pendidikan Aceh 2022 mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan pendidikan 2017-2022 yang terjadi dalam lingkup pendidikan Aceh, yaitu berkaitan dengan kualitas pendidikan yang terdiri dari masalah sarana prasarana,

peserta didik, pendanaan, layanan publik dan tata kelola pendidikan. Keseluruhan masalah tersebut telah diidentifikasi dan dirincikan akar permasalahannya dan diantara akar permasalahan tersebut yaitu: Ada beberapa hal yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Pertama, perlunya perbaikan Sarana dan prasarana pendidikan, termasuk terbatasnya fasilitas yang mendukung kelancaran aktivitas siswa. Sarana dan prasarana pendidikan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan siswa, kurang optimalnya penataan dan pemeliharaan aset satuan pendidikan, serta belum memadainya penataan, pemeliharaan, dan keamanan lingkungan sekolah.

Kedua, permasalahan terkait kesiswaan harus diatasi, seperti rendahnya tingkat penerimaan lulusan SMA ke perguruan tinggi dan lulusan SMK ke dunia usaha dan industri (DUDI). Selain itu, masih kurangnya bimbingan bagi siswa mengenai pendidikan keberlanjutan, terbatasnya maksimalisasi pemahaman dan praktik siswa terhadap pendidikan kewirausahaan, serta kurang optimalnya implementasi pendidikan karakter siswa. Apalagi kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan khusus dan layanan khusus belum maksimal. Ketiga, pendanaan masih menjadi tantangan karena terbatasnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak ketiga dalam pembiayaan pendidikan. Terakhir, terdapat kekhawatiran terkait pelayanan publik dan tata kelola pendidikan, antara lain lemahnya pengelolaan anggaran di sekolah, kurang dimanfaatkannya peran dan kinerja pengawas dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta kurang optimalnya penilaian kinerja guru dan kepala sekolah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2021 Dinas Pendidikan Aceh menunjukkan berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan pendidikan di Aceh, termasuk aspek tata kelola dan kualitas pendidikan. Permasalahan ini memiliki kaitan erat dengan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah. Permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk penunjang aktivitas siswa, merupakan tantangan signifikan dalam pendidikan di Aceh. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan pemeliharaan,

penataan, dan optimalisasi aset sekolah. Namun, lemahnya pengelolaan ini menunjukkan kurangnya kompetensi kepala sekolah dalam mengelola aset secara efektif dan inovatif. Ketidakmampuan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak mendukung, sehingga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa. Dalam hal ini, kepala sekolah perlu memperkuat kemampuan manajerial dan penggalangan dana untuk melibatkan pihak ketiga dalam peningkatan fasilitas sekolah.

Rendahnya tingkat keberhasilan lulusan SMA dan SMK ke jenjang yang lebih tinggi atau dunia kerja menunjukkan perlunya kepemimpinan kepala sekolah yang lebih proaktif dalam memberikan bimbingan pendidikan keberlanjutan, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan karakter. Kepala sekolah perlu berperan sebagai pemimpin transformasional yang mampu menginspirasi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Ketidakmaksimalan dalam pembelajaran di satuan pendidikan khusus juga menunjukkan perlunya pemimpin sekolah yang inklusif, yang memahami dan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang.

Kemudian, terbatasnya alokasi anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat serta pihak ketiga dalam pembiayaan pendidikan mencerminkan tantangan dalam tata kelola kepala sekolah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mengadopsi pendekatan kepemimpinan berbasis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pendanaan prioritas, menyusun strategi pelibatan komunitas, serta mencari peluang kolaborasi dengan sektor swasta atau dunia usaha. Kurangnya inisiatif kepala sekolah dalam memaksimalkan potensi sumber daya eksternal memperburuk situasi pendanaan ini, sehingga menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, lemahnya pengelolaan anggaran, kurang optimalnya peran pengawas, dan penilaian kinerja guru serta kepala sekolah yang tidak efektif menunjukkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu mengembangkan sistem akuntabilitas yang transparan dan mendorong partisipasi aktif pengawas pendidikan. Selain itu, kepala sekolah perlu menjadi contoh dalam penilaian

kinerja yang objektif dan berbasis kompetensi, serta mendorong budaya evaluasi yang berorientasi pada peningkatan mutu.

Hasil Rapor Mutu Kementerian pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi 2022 melalui laman websitenya dapat dilihat bahwa Rapor pendidikan publik 2022 untuk jenjang SMA/SMK/ sederajat di Aceh, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan di setiap kabupaten, menampilkan hasil evaluasi yang mencerminkan tingkat pencapaian belajar serta kualitas pendidikan yang ada. proses pembelajaran peserta didik seperti pada gambar 1.1 a dan b berikut.

## PROSES



**Gambar 1. 1 Proses Pembelajaran Peserta Didik**

Sumber: Raporpendidikan (raporpendidikan.kemendikbud.go.id)

## OUTPUT



**Gambar 1. 2 Output Hasil Belajar**

Sumber: Raporpendidikan (raporpendidikan.kemendikbud.go.id)

Berdasarkan data laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru telah berupaya melakukan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, namun pengembangan kualitas pembelajaran belum terstruktur, serta guru juga belum melaksanakan upaya yang maksimal dalam proses perbaikan mutu pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu kepemimpinan intruksional yang dilakukan kepala sekolah masih banyak kekurangan dalam implementasinya (Afrina et al., 2019). Hasil capaian belajar siswa mengungkapkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi mereka masih kurang memadai, dengan tingkat kompetensi yang berada di bawah ambang batas minimum yang seharusnya tercapai. Selanjutnya untuk indeks karakter telah mengalami perkembangan. Keseluruhan masalah yang telah diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan serta hasil rapor mutu publik di atas jelas menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, satuan pendidikan dan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat peningkatan mutu pendidikan yaitu kurikulum dan pembelajaran (Cahaya et al, 2021), kurangnya kompetensi guru serta pemahaman masyarakat (Wibawani, et al., 2019), budaya organisasi, pendanaan serta sarana prasarana (Lorensius, et al., 2021). Hal lainnya yang tidak dapat dilupakan dalam upaya peningkatan dan evaluasi terhadap mutu adalah kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu (Herawan, 2016).

Berbagai gaya kepemimpinan yang dimiliki kepala sekolah, baik Gaya kepemimpinan yang beragam meliputi: demokratis, delegatif, birokratis, laissez-faire, otoriter, karismatik, diplomatik, moralis, administratif, analitis, wirausaha, visioner, situasional, dan militeristik. (Salsabilla, et al., 2022). Kepala sekolah haruslah mampu menerapkan model kepemimpinan secara utuh dan baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin satuan pendidikan. Keterampilan kepala sekolah sangat mempengaruhi prestasi sekolah. Sehingga kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan yang luarbiasa bagi satuan pendidikan yang mereka kelola dan mereka pimpin (Siti Julaiha, 2019).

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 15 mengatur bahwa tugas utama Kepala Sekolah mencakup tiga hal utama: a) Manajerial, yang melibatkan

penerapan strategi untuk meningkatkan kinerja guru, b) Pengembangan kewirausahaan, yang berfokus pada kemampuan kepala sekolah dalam mencari dan mengelola sumber pendanaan, c) Supervisi, yang dilakukan terhadap guru dan tenaga kependidikan, bertujuan untuk mendukung kepala sekolah dalam pengembangan 8 standar pendidikan (Syamsuddin, 2020). Di sisi lain, Grissom et al. (2021) menyatakan bahwa kepala sekolah harus memiliki keterampilan dan keahlian yang mendalam untuk perilaku yang mampu mendukung untuk meningkatkan *outcome* sekolah. Adapun keterampilan dan perilaku tersebut meliputi beberapa aspek. Pertama: Keterampilan terdiri dari: 1) Pengembangan manusia dan keterampilan hubungan; 2) Keterampilan untuk mendukung instruksi kelas penguji, dan 3) keterampilan manajemen yang melampaui sekolah. Kedua: Perilaku terdiri dari: 1) Terlibat dalam interaksi intruksional yang berfokus pada guru; 2) Membangun iklim sekolah yang produktif; 3) Menfasilitasi kolaborasi produktif dan komunitas belajar profesional; 4) Mengelola personal dan sumber daya secara strategis (Grissom, et al, 2021).

Kepala sekolah diwajibkan memiliki kemampuan untuk membangun kebiasaan kerja yang berkualitas serta mengoptimalkan seluruh potensi yang ada demi mencapai standar mutu yang diinginkan.. Mulyasa (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan atau kegagalan proses pembelajaran dan pendidikan di sebuah sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola semua elemen yang ada di sekolah (*who is behind the school*). Ia juga menekankan bahwa tercapainya visi dan misi sekolah sangat bergantung pada cara kepala sekolah mengelola manajemen dan kepemimpinan, khususnya dalam memotivasi dan memberdayakan seluruh komponen yang terlibat di sekolah.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin juga harus mempunyai visi misi yang jelas, terukur serta mampu menyusun rencana kerja yang terencana, dan target kerja yang telah disusun tersebut haruslah dilaksanakan dan terpenuhi selama masa kepemimpinannya, yang merupakan salah satu bentuk dari kompetensi manajerial. Untuk mencapai semua itu maka seorang pemimpin haruslah memahami dengan baik visi misi yang telah disusun serta juga harus mampu mengevaluasi dan menganalisa pekerjaan yang dilaksanakannya. serta mampu mengelola sumber daya, memotivasi seluruh masyarakat sekolah agar

menjadi lebih baik serta mengarahkan masyarakat sekolah menuju kearah yang benar dan lebih baik. Ciri dari kepemimpinan tersebut sangatlah sesuai dengan karakteristik dari kepemimpinan visioner (Iskandar, 2017).

Visi merupakan arah, impian, nilai inti dari suatu organisasi. Visi sekolah dapat dipandang sebagai gambaran tentang sekolah ideal yang ingin di wujudkan bersama warga sekolah. Visi memiliki kekuatan mendorong seluruh warga sekolah untuk berkontribusi mewujudkan visi yang telah diaspirasikan bersama. Visi yang telah disusun akan memberi dampak baik seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa. Dengan demikian, setiap lembaga pendidikan harus dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki visi dan misi yang tegas serta terfokus (Mukhtar, 2020). Tanpa kepemimpinan yang demikian, upaya peningkatan mutu sekolah akan terhambat, bahkan berisiko menyebabkan kemunduran pada sekolah yang dipimpinnya. Dengan demikian, setiap lembaga pendidikan harus dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki visi dan misi yang tegas serta terfokus. Tanpa kepemimpinan yang demikian, upaya peningkatan mutu sekolah akan terhambat, bahkan berisiko menyebabnya (Syukri & Hasibuan, 2024).

Dengan demikian, kepala sekolah harus berperan sebagai pemimpin yang memiliki wawasan jangka panjang. Kepemimpinan visioner adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan arti pada setiap pekerjaan dan upaya kolektif yang dilakukan oleh anggota organisasi, dengan mengacu pada visi yang terarah dan jelas. abkan kemunduran pada sekolah yang dipimpinnya. (Khajeh, 2018). Pemimpin visioner memiliki keterampilan dalam menginspirasi anggotanya dengan menggunakan motivasi dan imajinasinya, Untuk menggerakkan organisasi dan memotivasi setiap anggotanya, agar organisasi tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Pemimpin visioner memiliki kemampuan untuk memberi arti dan arah yang jelas pada setiap pekerjaan atau usaha yang dilakukan, dengan fondasi yang kokoh.

Kepemimpinan visioner ditandai dengan kemampuan untuk menyusun rencana yang terarah menuju kesuksesan. Ini tercermin dalam kemampuan untuk menyampaikan visi yang mampu mendorong kreativitas, membangun kekompakan dalam pengembangan profesional, dan menekankan peningkatan

efisiensi serta kualitas dalam pengembangan pendidikan tinggi. (Hidayah, 2016). Pemimpin visioner memiliki wawasan kepemimpinan yang praktis, mampu menginspirasi orang lain, dan mengarahkan organisasi untuk meraih tujuan masa depan yang lebih cerah daripada kondisi saat ini (Asih Widi Lestari et al., 2023). Kepemimpinan ini juga ditandai dengan konsistensi dan fokus dalam mengejar visi, sambil tetap adaptif dan tanggap terhadap tantangan serta peluang yang muncul dalam perjalanan organisasi berkualitas dalam pengembangan pendidikan tinggi. (Ubaidillah, et al, 2019).

Irwana (2015) dan Handarini (2019) menyebutkan bahwa kepemimpinan visioner yang diterapkan oleh kepala sekolah memiliki dampak besar terhadap efektivitas sekolah, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kinerja para guru. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fansiska, Harapan, & Tahrin (2020) menunjukkan, Kepemimpinan visioner yang diterapkan oleh kepala sekolah memiliki dampak besar terhadap efektivitas sekolah, yang Kepemimpinan visioner yang diterapkan oleh kepala sekolah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja guru, dengan disiplin kerja guru juga turut memengaruhi hasil kinerja mereka. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan visioner kepala sekolah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas sekolah dan peningkatan kinerja guru pada gilirannya dipengaruhi oleh kinerja para guru, sehingga nantinya akan memberikan dampak positif juga pada mutu pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pemimpin yang visioner akan selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan organisasinya.

Pemimpin dalam suatu organisasi dipandang sebagai perwakilan bagi organisasi tersebut. Sehingga staff atau warga pimpinannya akan secara praktis patuh pada perintah pimpinan. Fakta ini menunjukkan bahwa penting untuk memilih seorang pemimpin yang mampu memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh warganya. Selain itu pemimpin juga sebaiknya merupakan orang-orang dengan sikap profesionalitas dan integritas yang tinggi, sehingga mampu mengajak seluruh warganya untuk sama -sama meningkatkan kinerja mereka untuk kemajuan organisasi (Meslec, et, al., 2020). Hal ini juga memberikan gambaran bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pegawainya (Saaleem, et, al, 2020). Integritas dalam kepemimpinan selalu berpasangan

dengan profesionalisme, kedua hampir tidak dapat dipisahkan. Integritas haruslah muncul atas dasar kesadaran diri individu bukan karena tuntutan pekerjaan semata (Rakhmanto et al., 2021).

Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab terhadap komitmen, kesesuaian antara tindakan dan nilai pribadi, perilaku yang konsisten, serta pemahaman yang kuat tentang prinsip moral dan etika. (Mulyani & Sjamsuri, 2019). Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab terhadap komitmen, kesesuaian antara tindakan dan nilai pribadi, perilaku yang konsisten, serta pemaIntegritas sering kali dipandang sebagai bagian dari perilaku, yang erat kaitannya dengan nilai-nilai etika dan moral. Perilaku yang mencerminkan integritas seharusnya tidak hanya timbul karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan seseorang berperilaku demikian, tetapi juga karena individu tersebut menyadari bahwa memiliki integritas adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam keluarga, organisasi, atau bahkan negara.haman yang kuat tentang prinsip moral dan etika. (Redjeki & Heridiansyah, 2013).

Pemimpin yang berintegritas berarti pemimpin yang memiliki kompetensi untuk memimpin rakyatnya dengan baik. Integritas yang dirasakan dalam kepemimpinan berperan sebagai pendorong penting bagi produktivitas karyawan di perusahaan (Wei, et al, 2020). Selain itu dengan kepemimpinan yang berintegritas memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang benar untuk setiap kondisi dan situasi, dan dengan sikap dan perilaku yang benar, agar mampu membangun kepercayaan dengan warga pimpinannya. Pemimpin tersebut akan memberikan diri mereka demi mencapai kepentingan atau kebutuhan bersama, bukan egois mementingkan diri sendiri (Purwadhi et al., 2021).

Weimann (2017) menyatakan bahwa terdapat perilaku utama untuk kualitas kepemimpinan, pertama, *behaviours*: kompetitif, eksperimental, focus, berpikir keras, contohnya Hilary Clinton; kedua, *pioneer*: energik, spontan, inovator, curah pendapat, contohnya Steve Jobs; ketiga, *networker integrator*: diplomatis, empati, membantu, berorientasi pada konsensus, berorientasi pada hubungan, contohnya Nelson Mandela; keempat, *populist*: memberi tahu massa apa yang ingin mereka dengar dan kejar kepentingannya sendiri di balik layar, contohnya Donal Trump, kelima, *guardian*: setia, realistis, metodis, terstruktur,

waspada, contohnya Angela Merkel. Selain berintegritas pemimpin juga dituntut untuk mampu bersikap profesional. Profesionalisme didefinisikan sebagai individu yang ahli dalam bidang yang ditekuninya. Kondisi ini akan membantu individu menunjukkan aktualisasi dirinya. Aktualisasi diri di tempat kerja hanya terjadi jika individu dapat menggunakan kompetensi profesional, menunjukkan keefektifan, dan diberi kesempatan untuk membuat tugas secara mandiri (Weimann, 2017).

Profesionalisme berkaitan dengan kemampuan mengelola perencanaan sekolah, kelembagaan sekolah, mengarahkan tenaga pendidikan, mengatur hubungan sekolah-masyarakat, menguasai sistem laporan dan administrasi sekolah, mengembangkan kurikulum, melatih jiwa kewirausahaan, melakukan supervisi, melakukan evaluasi, pengembangan IPTEK, menciptakan budaya dan iklim kerja yang sehat (Naim, 2017). Adapun profesionalisme kepala sekolah juga dipandang sebagai bentuk komitmen kepala sekolah untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi, dengan tujuan kualitas keprofesionalannya dalam menjalankan dan memimpin sumber daya seluruh warga sekolah dapat terwujud (Botutihe, 2020). Merujuk kedua definisi diatas maka profesionalisme berkaitan dengan komitmen, arah, peningkatan dan pengembangan kemampuan pemimpin.

Menjadi kepala sekolah yang profesional bukanlah hal yang mudah. Menurut Syafarina, et al (2021) saat ini masih adanya kepala sekolah yang belum menekuni profesinya secara profesional. Ia menambahkan rendahnya profesionalisme kepala sekolah dan guru dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) masih banyak kepala sekolah yang belum sepenuhnya menekuni profesinya, (2) kualifikasi akademik kepala sekolah belum memenuhi syarat, (3) kurangnya pelatihan bagi kepala sekolah dalam kemampuan manajerial, (4) kepala sekolah belum mengikuti program penguatan kepala sekolah. Rendahnya profesionalitas kepala sekolah akan mempengaruhi Kinerja produktif kepala sekolah yang pada gilirannya akan berpengaruh langsung terhadap kualitas sekolah. dan berujung pada mutu pendidikan. Sehingga perlu adanya kesadaran dan upaya serius dari kepala sekolah untuk meningkatkan produktifitasnya dan kualitas kinerjanya.

Peningkatan keprofesional kepala sekolah bukanlah hal yang mudah dilakukan. upaya peningkatan keprofesionalan kepala sekolah tidak akan terwujud begitu saja, tanpa adanya motivasi, komitmen dan kesadaran dalam diri kepala sekolah, untuk terus semangat mengabdikan dalam meningkatkan kualitas sekolah, melalui kinerja yang diwujudkan dari visi, misi, tujuan dan capaian program yang jelas dan terukur (Botutihe, 2020). Pemimpin yang profesional akan membantu kinerja guru yang profesional. Untuk mencerminkan kinerja guru yang profesional diperlukan kepala sekolah yang profesional yang dapat memahami faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja guru, dengan demikian kepala sekolah diharapkan dapat melakukan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja guru (Syafarina, et al., 2021).

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas sebelumnya, khususnya berkaitan dengan permasalahan pendidikan yang terjadi di Aceh periode 2017-2022 dengan mengacu pada hasil Kinerja produktif kepala sekolah dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) langsung terhadap kualitas sekolah 2021 Dinas Pendidikan Aceh 2022 yang mengidentifikasi berbagai masalah dalam mutu pendidikan. Pada tingkatan Sekolah Menengah Kejuruan masalah yang dipaparkan berdasarkan laporan mutu publik pada website kementerian pendidikan menggambarkan bahwa output yang dihasilkan masih belum optimal. Selain itu, hasil riset yang dilakukan oleh Timor, et al (2018), penelitian ini mengungkapkan bahwa, meskipun hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru tergolong lemah, namun tetap signifikan dan memberikan dampak positif terhadap kualitas sekolah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas kepemimpinan yang lebih sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Berdasarkan hal ini, peneliti melakukan kajian untuk mengeksplorasi penerapan kepemimpinan visioner yang berlandaskan integritas dan profesionalisme sebagai upaya untuk meningkatkan mutu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bireuen.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan hasil permasalahan di lapangan diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Identifikasi melalui LAKIP dinas pendidikan Aceh bahwa terdapat permasalahan pendidikan di Aceh yang meliputi permasalahan kualitas pendidikan.
- 2) Rendahnya akseptabilitas lulusan SMA ke perguruan tinggi dan lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- 3) Berdasarkan hasil penelitian peneliti sebelumnya dikemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas sekolah adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah.
- 4) Berkaitan dengan gaya kepemimpinan visioner. Hidayah (2016) mengemukakan bahwa kepemimpinan visioner ditandai dengan kemampuan membuat rencana yang jelas untuk berhasil. Hal ini ditandai dengan mengartikulasikan visi yang dapat menumbuhkan kreativitas dan kekompakan dalam pengembangan profesional dan fokus pada peningkatan kualitas efisiensi dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
- 5) Seorang pemimpin penting untuk menerapkan sifat Integritas (Wei et al, 2020) dan profesionalitas (Syafarina, et al, 2021) dalam kepemimpinannya.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dinyatakan rumusan utama penelitian ini adalah : “bagaimanakah pengaruh kepemimpinan visioner berbasis integritas dan profesionalitas terhadap peningkatan mutu sekolah di SMK Kabupaten Bireun”. Adapun rumusan khusus dari penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berikut :

1. Bagaimana gambaran mutu SMK di Kabupaten Bireun?
2. Bagaimana gambaran kepemimpinan visioner kepala sekolah pada SMK di Kabupaten Bireun?
3. Bagaimana gambaran kepemimpinan visioner berbasis integritas kepala sekolah pada SMK di Kabupaten Bireun?
4. Bagaimana gambaran kepemimpinan visioner berbasis profesionalitas kepala sekolah pada SMK di Kabupaten Bireun?

5. Bagaimana kepemimpinan visioner berbasis integritas dan profesionalitas kepala sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah SMK di Kabupaten Bireun?
6. Bagaimana pengembangan model implementasi kepemimpinan visioner berbasis integritas dan profesionalitas kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah SMK di Kabupaten Bireun?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan didasarkan pada rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Tergambarkannya mutu SMK di Kabupaten Bireun.
2. Terdeskripsikan gambaran kepemimpinan visioner kepala sekolah pada SMK di Kabupaten Bireun
3. Terdeskripsikan gambaran kepemimpinan visioner berbasis integritas kepala sekolah pada SMK di Kabupaten Bireun.
4. Terdeskripsikan gambaran kepemimpinan visioner berbasis profesionalitas kepala sekolah pada SMK di Kabupaten Bireun.
5. Teranalisisnya kepemimpinan visioner berbasis integritas dan profesionalitas kepala sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah SMK di Kabupaten Bireun.
6. Terumuskannya pengembangan model implementasi kepemimpinan visioner berbasis integritas kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah SMK di Kabupaten Bireun

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini akan menambah literatur tentang kepemimpinan visioner dalam konteks pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kepemimpinan berbasis integritas dan profesionalitas dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan mengenai peran kepala

sekolah sebagai pemimpin yang visioner serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model kepemimpinan yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan strategi kepemimpinan di sekolah.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi kepala sekolah tentang bagaimana menerapkan kepemimpinan visioner yang berlandaskan integritas dan profesionalitas untuk meningkatkan mutu sekolah. Membantu kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang diperlukan untuk memimpin sekolah dengan lebih efektif. Serta mendorong kepala sekolah untuk menerapkan strategi kepemimpinan yang inovatif dan berbasis data untuk perbaikan kinerja sekolah secara keseluruhan.

### b. Bagi Penelitian Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kepemimpinan visioner, integritas, dan profesionalitas dalam konteks pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya dalam mengidentifikasi area-area baru yang belum tersentuh dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

## 1.6 Struktur Organisasi Disertasi

Struktur Organisasi Disertasi terdiri dari:

1. BAB I Pendahuluan, Pada bagian di bawah ini disampaikan struktur bab pendahuluan meliputi: Latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, Rumusan masalah penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Struktur organisasi disertasi;
2. BAB II Kajian Pustaka: Bab ini memberikan latar belakang yang jelas mengenai topik atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bagian

ini sangat penting karena melalui kajian pustaka, akan ditunjukkan kondisi terkini dari teori yang dikaji serta posisi masalah penelitian dalam bidang ilmu terkait. Bab ini meliputi: 1) konsep dan teori serta turunannya yang relevan dengan bidang penelitian; 2) hasil penelitian terdahulu yang relevan; dan 3) posisi teoritis peneliti terkait masalah yang diteliti.

3. BAB III Metode Penelitian, Bagian ini bersifat prosedural, mengarahkan pembaca untuk memahami bagaimana peneliti merancang alur penelitian mulai dari pendekatan yang digunakan, instrumen yang dipakai, tahapan pengumpulan data, hingga langkah-langkah analisis data.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, Bab ini memaparkan dua hal utama, yaitu: 1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sesuai dengan urutan rumusan permasalahan; dan 2) pembahasan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan interpretasi peneliti terhadap hasil analisis temuan serta mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut; dan
6. REFERENSI. Bagian ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang dirujuk dalam laporan penelitian dan penulisan disertasi, ditulis dalam gaya *American Psychological Association* (APA) yang sesuai dengan sistem yang diadaptasi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.